

Catatan Akhir Tahun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) 2020

Tim Peneliti PSHK

Disampaikan dalam Forum Kajian Pembangunan (FKP)

23 Desember 2020



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Catatan Akhir Tahun PSHK 2020



1. Legislasi



**Pemantauan
proses**



**Perencanaan
dan capaian**



**Refleksi
metode
omnibus
dalam
legislasi**



Proses Legislasi

Transparansi

Akses kepada dokumen pembahasan **sulit**

Kanal resmi penyebarluasan dokumen **tidak jelas**

Dokumen yang tersebar **tidak aksesibel** untuk penyandang disabilitas

Partisipasi

Minim kesempatan partisipasi masyarakat

Waktu pembahasan **singkat**

Tidak terbangunnya sistem partisipasi publik di masa pandemi



Contoh Proses Tidak Transparan : UU Cipta Kerja

Terdapat **perbedaan signifikan** dari draf RUU Cipta Kerja versi Rapat Paripurna setebal 905 halaman per 5 Oktober 2020 dan RUU Cipta Kerja versi diserahkan kepada Presiden setebal 812 halaman per 14 Oktober 2020, yakni **adanya perubahan, penghapusan, dan pengaturan baru atas ketentuan dari 10 Undang-Undang.**



Profil Legislasi 2020

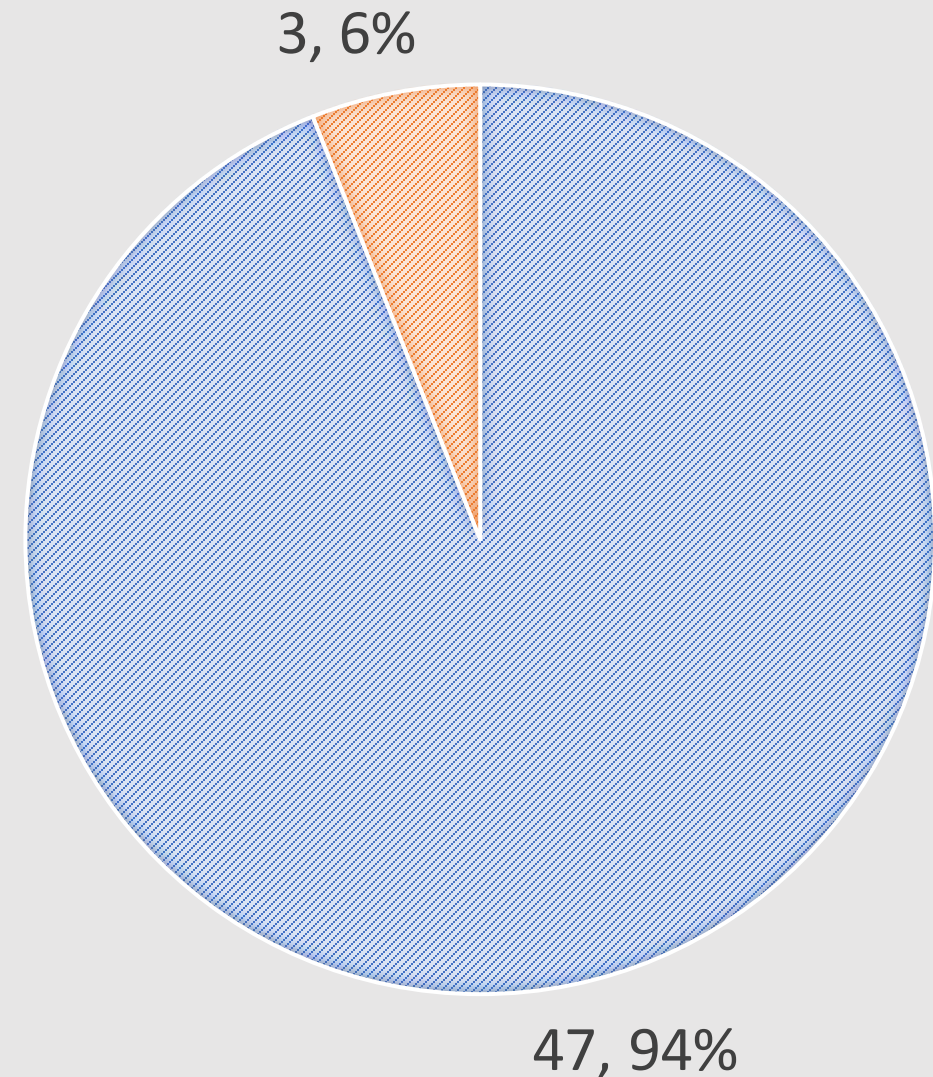
UU yang disahkan pada 2020:

1. UU tentang Minerba
2. UU tentang Bea Materai
3. UU tentang Cipta Kerja

Substansi UU tentang Minerba dan UU tentang Cipta Kerja **bermasalah dan sedang diuji ke Mahkamah Konstitusi**

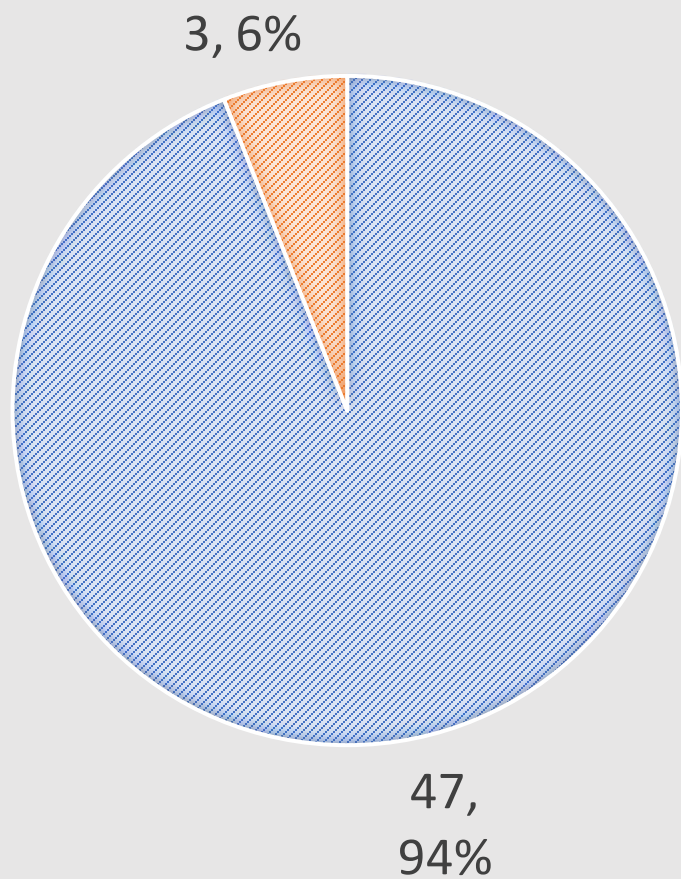
CAPAIAN PROLEGNAS 2020

■ Belum Disahkan ■ Disahkan



CAPAIAN PROLEGNAS 2020

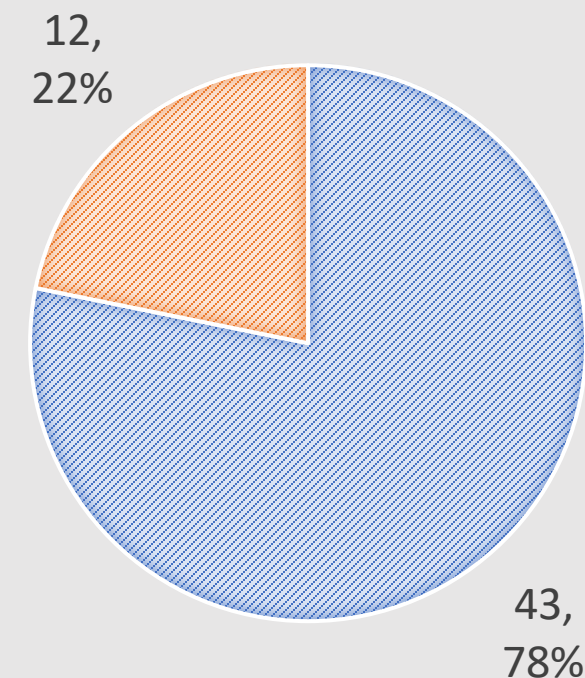
■ Belum Disahkan ■ Disahkan



Perencanaan dan Capaian

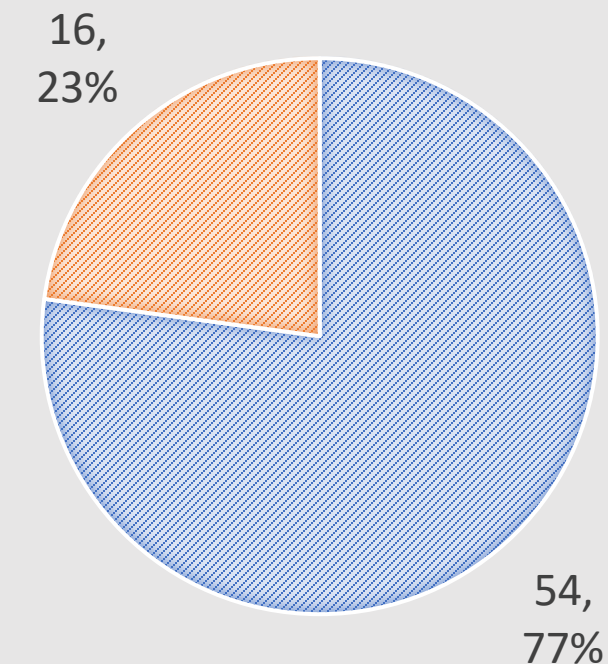
CAPAIAN PROLEGNAS 2019

■ Belum Disahkan ■ Disahkan



CAPAIAN PROLEGNAS 2010

■ Belum Disahkan ■ Disahkan



Capaian Legislasi 2020 **lebih rendah** dibandingkan dengan Capaian Legislasi 2019 dan 2010



Perencanaan dan Capaian

- Perencanaan legislasi **tidak sejalan** dengan perencanaan pembangunan
- Jumlah RUU prioritas tahunan **tidak realistis**

10 UU diluar 50 RUU Prioritas yang disahkan pada 2020

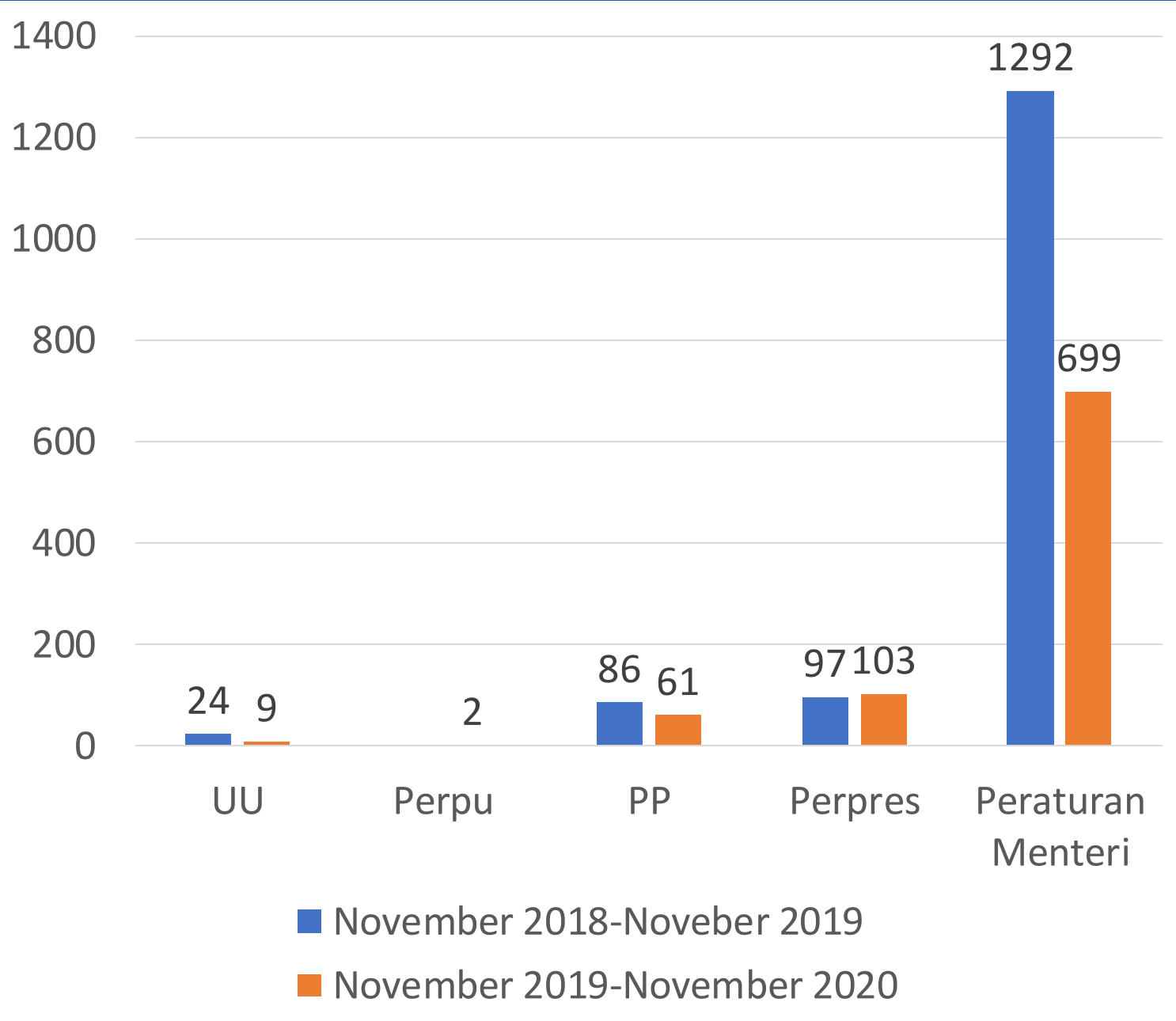
No	Klasifikasi	Daftar UU
1	Pengesahan perjanjian internasional tertentu	<ul style="list-style-type: none">- Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia- Pengesahan persetujuan pemerintah RI dan kabinet menteri Ukraina di bidang pertahanan- Bantuan hukum timbal balik RI dan Konfederasi Swiss- Kerjasama di bidang pertanian RI dengan Kerajaan Denmark- Protokol melaksanakan paket komitmen kerja sama ASEAN di bidang jasa keuangan
2	Akibat putusan MK	<ul style="list-style-type: none">- Revisi UU MK
3	APBN	<ul style="list-style-type: none">- Pertanggungjawaban APBN 2019- APBN 2021
4	Pembentukan, pemekaran, dan, penggabungan daerah	Tidak ada
5	Penetapan/ pencabutan Perppu	<ul style="list-style-type: none">- Perppu terkait penanganan Covid-19- Perppu terkait Pemilukada





PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Perbandingan Jumlah Peraturan Perundang-undangan Periode November 2018- November 2019 dengan Periode November 2019- Desember 2020



Terjadi tren penurunan jumlah peraturan perundang-undangan yang disahkan pada November 2019 sampai November 2020 dibandingkan dengan periode yang sama 1 tahun sebelumnya.

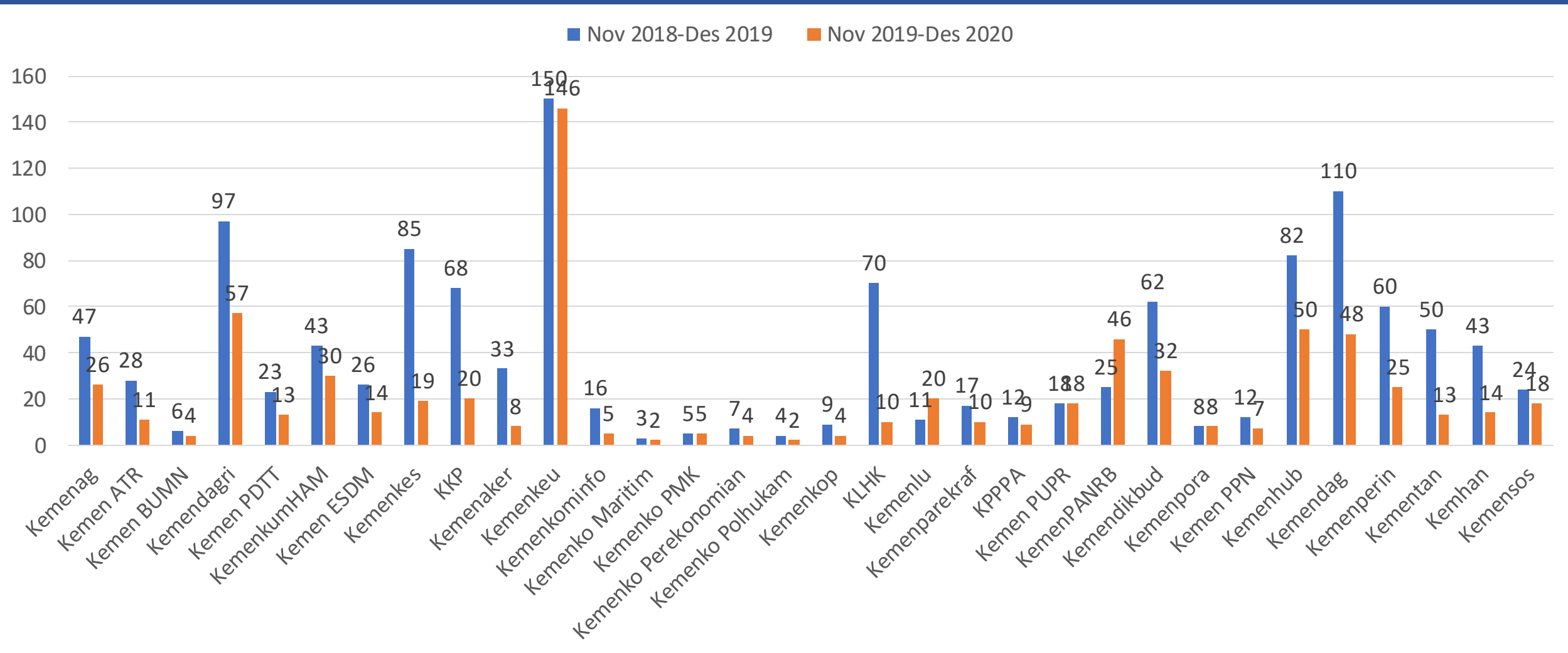
Dampak Pandemi COVID 19 dan sesuai dengan agenda Reformasi Regulasi

Perbandingan Jumlah Pembentukan Peraturan Menteri Pada Setiap Kementerian

(Periode November 2018-Desember 2019 dan November 2019-Desember 2020)



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



Penggunaan Metode Omnibus Dalam Penyusunan UU Cipta Kerja



Draft sulit Dipahami

Pembahasan cepat,
mengorbankan
partisipasi publik

Harmonisasi
dan sinkronisasi
tidak berjalan
dengan baik



2. Penegakan Hukum

**Pengekangan
kebebasan
berpendapat**

Penegakan hukum
untuk
melanggengkan
implementasi
kebijakan

Penangkapan
digunakan untuk
menghadapi massa
aksi unjuk rasa

Desain
kelembagaan
untuk kepentingan
jangka pendek



3. Peradilan

KY

Kepemimpinan baru diharapkan berperan dalam penegakan kehormatan hakim

MK

Independensi kelembagaan dipertanyakan, terkait revisi masa jabatan dan pemberian penghargaan kepada Hakim MK

MA

Kebijakan internal dan koordinasi antar lembaga untuk penyelesaian perkara di masa pandemi



Anti-Korupsi

Tantangan Internal Kelembagaan KPK

- Pengunduran diri sejumlah pegawai KPK

Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

- Penjatuhan teguran tertulis berdasarkan keputusan bersalah melanggar kode etik dari Dewan Pengawasan KPK Kepada Ketua KPK

HAM dan Demokrasi

Pilkada di Masa Pandemi

- Perppu pengunduran waktu **lolos** sampai menjadi UU di tengah **penolakan DPD dan organisasi masyarakat** seperti Muhammadiyah dan NU
- Penyelenggara dan calon kepada daerah di Pemilukada **tertular COVID-19** dengan 19 di antaranya meninggal dunia

Kebebasan Berpendapat

- Upaya **kriminalisasi** pihak yang mengkritisi kebijakan Pemerintah
- Upaya **serangan digital** pihak yang mengkritisi kebijakan Pemerintah
- Kebebasan berkeekspresi dihadapi dengan **pendekatan politik dan keamanan**

Pelanggaran HAM Masa Lalu

- Terus berlanjut menjadi **jargon**
- **Belum ada titik terang** keberlanjutan proses penegakan hukum berjalan

Tata Kelola Penanganan Covid-19



Kelembagaan
tidak efektif

Birokratisasi
pengambilan
kebijakan PSBB

Inkonsistensi
pengambilan
kebijakan



Birokratisasi Penetapan PSBB

Penetapan
PSBB didahului
permohonan
dari Pemda
atau Gugus
Tugas

Fase
Pengambilan
Keputusan

Gugus Tugas dapat
menjadi forum
pengambilan keputusan
secara langsung karena
Pemda dan Menkes
adalah bagian dari
Gugus Tugas

Penetapan
PSBB mem-
pertimbangkan
pendapat
Gugus Tugas

Penetapan
PSBB dilakukan
oleh Menteri
Kesehatan

Istilah
“permohonan”
tidak ada di UU
atau PP. Dalam
PP, pemda
mengajukan
usul.

Fase
Pengajuan
Permohonan

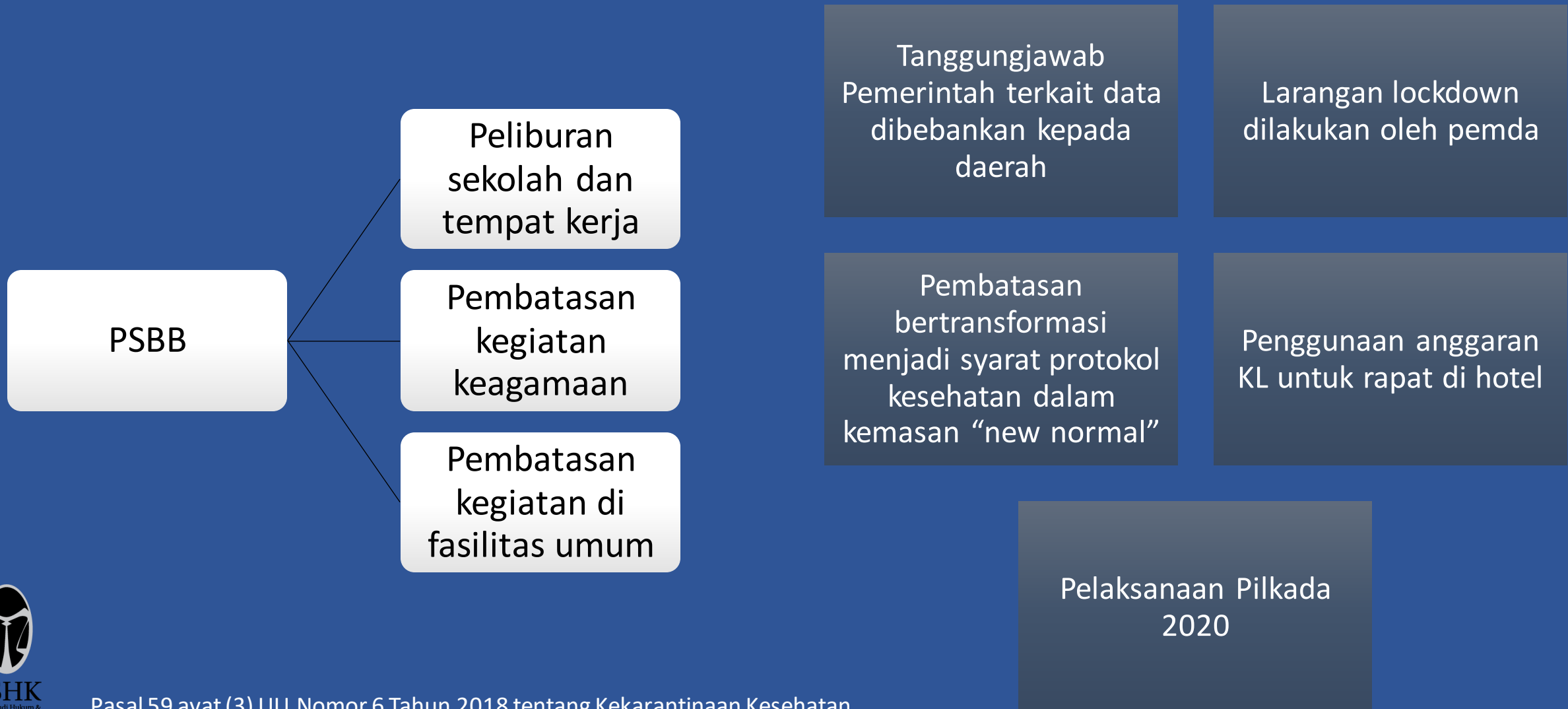
Pemda tidak memiliki
kapasitas yang sama dan
seharusnya hanya
berperan dalam
konfirmasi kesiapan
daerah melaksanakan
PSBB

Permohonan
memuat sejumlah
data yang
seharusnya sejak
awal dimiliki
Pemerintah pusat

Permohonan
pemda akan
dikaji kembali
oleh tim
Kemenkes



Inkonsistensi Penerapan Kebijakan



6 Tantangan Reformasi Hukum 2021

Untuk DPR dan Pemerintah

- menciptakan proses legislasi yang transparan dan partisipatif
- menciptakan perencanaan legislasi yang realistis dan menjawab kebutuhan di masa pandemi COVID 19 saat ini

Pemerintah

- melaksanakan agenda Reformasi Regulasi, khususnya merealisasi Badan Regulasi Nasional dan Revisi UU 12/2011
- mendorong terealisasinya reformasi kelembagaan aparat penegak hukum

Mahkamah Konstitusi

- mengembalikan independensi KPK melalui Putusan terhadap Uji Formil dan Materiil terhadap Revisi UU KPK
- Membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan sikap independent dan mampu menghasilkan putusan yang berkualitas ditengah sempitnya ruang partisipasi dalam pembentukan UU



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Terima kasih

Webiste : pshk.or.id

Twitter : [@PSHKIndonesia](https://twitter.com/PSHKIndonesia)

IG : [pshkindonesia](https://www.instagram.com/pshkindonesia)

YouTube : [PSHK Indonesia](https://www.youtube.com/PSHKIndonesia)